

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Musim Semi Arab (*Arab Spring*) merupakan rentetan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab terkait isu-isu kebebasan berpolitik, kemiskinan, pengangguran, serta pemimpin negara yang diktator, otoriter, dan korup (Tamburaka 2011, hlm.9), meskipun tidak semua aksi unjuk rasa dan protes tersebut dilakukan oleh orang-orang Arab. Pada mulanya, *Arab Spring* terjadi pada tanggal 18 Desember 2010 yang ditandai oleh revolusi di Tunisia dan Mesir; perang saudara di Libya; pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Yaman; protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman; serta protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, dan Sahara Barat. Rentetan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di negara-negara Arab tersebut menggunakan beberapa teknik diantaranya, yaitu melalui pemberontakan sipil dalam kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, dan *Skype*, yang digunakan oleh massa demonstran untuk mengorganisir, berkomunikasi, serta meningkatkan kesadaran terhadap upaya-upaya penekanan dan penyensoran internet yang dilakukan oleh pemerintah (Falahi 2013, hlm.189-190).

Sementara itu, Revolusi Yaman yang merupakan bagian dari *Arab Spring* terjadi setelah Revolusi Tunisia dan berbarengan dengan Revolusi Mesir serta beberapa protes massa demonstran lainnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika pada tahun 2011. Pada fase awal, protes di Yaman terkait dengan tidak adanya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi yang buruk, korupsi, dan terdapat usulan pemerintah mengenai keinginan untuk memodifikasi konstitusi Yaman. Tuntutan massa demonstran kemudian berkembang menyerukan agar mantan presiden Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri pada saat itu. Penyeberangan secara massal dari militer maupun dari pemerintahan Saleh secara efektif menjadikan banyak

wilayah negara berada diluar kendali pemerintah, dan massa demonstran bertekad untuk menentang otoritasnya (Agastya 2013).

Dalam hal ini, Yaman merupakan satu unsur penting yang membentuk bangunan peradaban Islam sejak awal mula kedatangan agama ini. Penduduk Yaman mulai memeluk Islam secara massal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu pula, partisipasi mereka dalam *futuhat* (ekspansi pembebasan) Islam sangat signifikan. Hingga kini, di masa ketika Islam mengalami masa-masa surut dalam *platform* politik dunia, kaum jihadi sebagai representasi utama pejuang Muslim, memperlihatkan eksistensi mereka di Yaman sebagai lokasi yang memiliki nilai 'sakral' bagi dunia Islam (Al-Barudi 2013). Adapun, rangkaian pergolakan *Arab Spring* yang pecah pada bulan Desember 2010 lalu telah menyeret Yaman ke dalam pusarannya sejak bulan Januari 2011. Konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan dominan (*key players*) di Yaman sangat menentukan terjadinya eskalasi ketegangan. Kekuatan Muslim Sunni di wilayah selatan, Syi'ah al-Houthi di wilayah utara, dan rezim pemerintahan di ibukota terlibat konflik bersenjata dan perebutan pengaruh sejak saat itu. Sementara itu, unsur-unsur Gerakan Yaman Selatan (*Southern Movement*), suku-suku lokal, serta kepentingan regional dan internasional dari negara-negara berpengaruh juga turut hadir di Yaman dalam ranah politik yang cukup rumit (Ervianto, n.d., hlm.1).

Pada tahun 2012, situasi *chaos* mendera Yaman menyusul pengepungan istana dan pelengseran pemerintah yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi yang menjadi salah satu unsur penting dalam persoalan Yaman. Kelompok bersenjata al-Houthi atau yang lebih dikenal dengan nama *Ansarullah* di kalangan internal mereka, memiliki basis wilayah di provinsi Sa'ada, yang berjarak sekitar 240 km arah utara ibukota Sana'a. Provinsi ini berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Arab Saudi. Kelompok bersenjata al-Houthi ini merupakan pengikut sekte Zaidiyah. Zaidiyah merupakan salah satu sekte Syi'ah yang secara eksklusif eksis di Yaman. Kelompok ini memiliki andil kekuasaan dalam waktu yang sangat lama, lebih dari beberapa abad, dan mereka tetap memimpin Yaman hingga tahun 1962 ketika terjadi Revolusi Yaman yang pertama. Al-Houthi kerap kali dituduh – bahkan oleh antar-sesama Zaidi sendiri –

bahwa secara rahasia telah berubah haluan menjadi pengikut sekte Syi'ah Imamiyah, yang menjadi agama resmi negara sekutu mereka, yaitu Iran (Gillam dan Moran 2011).

Kisah mengenai al-Houthi, jika dirunut ke belakang, bermula di Sa'ada sebagai titik konsentrasi bagi kaum Zaidiyah pada umumnya. Pada tahun 1986, terbentuklah lembaga Persatuan Pemuda (*Ittihad Asy-Syabab*). Lembaga ini bertujuan untuk mengajarkan paham Zaidiyah bagi para pemeluknya. Badruddin Al-Houthi, salah satu ulama Zaidiyah saat itu, termasuk salah satu pengajar di lembaga tersebut. Menyusul terjadinya penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi Republik Yaman pada tahun 1990, situasi politik mulai berubah. Kesempatan multipartai terbuka lebar. Untuk itu, *Ittihad Asy-Syabab* menjelma menjadi *Hizb Al-Haqq* (Partai Kebenaran) yang merepresentasikan kepentingan kaum Zaidiyah. Hussain Al-Houthi – putera Badruddin Al-Houthi – muncul ke permukaan sebagai tokoh terkemuka di partai ini (Winter 2012).

Pada tahun 1990, Hussain Al-Houthi mengundurkan diri dari *Hizb Al-Haqq* dan membentuk kelompok tersendiri. Pada mulanya, kelompok tersebut hanya berupa kelompok kajian ilmu pengetahuan agama dan pemikiran. Bahkan, kelompok ini menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk melawan kekuatan Islam Sunni yang diwakili oleh Partai Persatuan dan Reformasi Yaman. Namun di kemudian hari berangsur berbalik menentang pemerintah yang dimulai sejak tahun 2002. Pengaruh al-Houthi yang tumbuh di akhir tahun 1990-an tersebut diiringi oleh perilaku semakin kontroversial sebagian pengikutnya, yang pada gilirannya mendorong pemerintah Yaman mengambil tindakan tegas dalam rangka merespon perubahan dinamika internasional. Perburuan pemerintah yang pada akhirnya berhasil membunuh Hussain Al-Houthi, telah melepaskan spiral kekerasan yang dimulai pada tahun 2004 yang dikenal sebagai enam rangkaian "Perang Sa'ada". Kelompok ini kemudian berubah dari jaringan revivalis Zaidi akar rumput di bawah kepemimpinan Hussain Al-Houthi menjadi kekuatan tempur pemberontak yang kuat di bawah kepemimpinan saudara seayah Hussain, yaitu Abdul Malik Al-Houthi (Winter 2012).

Gerakan kelompok bersenjata al-Houthi bangkit dengan mengusung isu untuk mendapatkan otonomi kekuasaan dari pemerintah Yaman, serta memperbaiki kerusakan tatanan sosio-ekonomi dan marginalisasi historis atas kelompok mereka. Melalui berbagai pemberontakan melawan angkatan bersenjata Yaman sejak tahun 2004 dan lebih dari enam rangkaian konflik (*six rounds*), al-Houthi berhasil mendapatkan kontrol atas provinsi Sa'ada sepanjang waktu tersebut, dan bahkan merambah batas sebagian wilayah provinsi-provinsi tetangganya seperti Al-Jawf, Amran, dan Hajjah. Pada bulan Februari 2010, kelompok ini menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Yaman (Gillam dan Moran 2011). Sementara itu, pasca meletusnya Revolusi Yaman pada bulan Januari 2011, dalam rangkaian *Arab Spring*, kondisi Yaman secara umum menjadi semakin tidak terkendali. Dinamika perpolitikan, konflik, dan keamanan berputar begitu cepat. Menyusul aksi bentrok dan demonstrasi rakyat yang tidak berkesudahan, membuat mantan presiden Ali Abdullah Saleh meletakkan jabatannya pada saat itu dan digantikan oleh Abdu Rabbu Mansour Hadi sejak tahun 2012 (Al-Dawsari 2012).

Dengan lemahnya pemerintahan baru serta diperparah oleh konflik berkepanjangan dan keruwetan negara yang tidak terkendali, akhirnya berakhir pula pemerintahan Hadi. Sehingga, di Yaman tidak ada lagi pemerintah, tidak ada pula presiden (*vacuum of power*). Pada tanggal 22 Januari 2015, setelah milisi Syi'ah Zaidi, al-Houthi, yang berbasis di provinsi Sa'ada bagian wilayah utara Yaman mengepung istana presiden di Sana'a, baik Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi maupun Perdana Menteri Khaled Bahah yang mendapat kepercayaan parlemen sejak bulan Desember 2014, mengundurkan diri.

Masa transisi yang dilalui Yaman sejak lengsernya Ali Abdullah Saleh – dengan ditandatanganinya pernyataan pengalihan kekuasaan ke tangan Abdu Rabbu Mansour Hadi pada tanggal 23 November 2011 yang dimediasi oleh *the Gulf Cooperation Council* (GCC) – pada akhirnya menempatkan Yaman sebagai sebuah *failed state*. Sebab, pemerintahan Abdu Rabbu Mansour Hadi dipandang lemah dan tidak mampu mengontrol situasi keamanan, gejolak politik, serta berbagai rivalitas antar-suku, faksi agama, dan militan bersenjata. Selain itu,

korupsi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan buruknya infrastruktur, yang memang sejak lama sudah terjadi di Yaman, turut memperlemah pemerintahan Hadi. Namun, Hadi tidak sepenuhnya dilimpahi beban tanggungjawab atas gagalnya transisi demokratis di Yaman. Aktor-aktor politik utama lainnya juga telah melakukan kesalahan perhitungan strategi yang cukup fatal yang justru memberikan keuntungan di pihak al-Houthi (Gasim 2015, hlm.1).

Keberhasilan al-Houthi menduduki ibukota Sana'a berbuntut panjang dan membuka kran keterusikan negara-negara Teluk, maka pada tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi memimpin serangan udara atas posisi-posisi al-Houthi di Yaman. Masuknya peran militer negara-negara Arab dan Teluk ke dalam pusaran konflik internal Yaman memantik eskalasi risiko bahwa krisis Yaman akan berubah menjadi perang regional (Gambrell 2015, hlm.1).

Pasukan koalisi ini terdiri dari angkatan bersenjata dari Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Bahrain, Kuwait, Maroko, Sudan, dan Mesir. Pakistan menyatakan akan melindungi integritas wilayah Arab Saudi, namun tidak akan terjun langsung dalam konflik yang "akan berdampak pada perpecahan di dunia Islam". Sementara itu, Amerika Serikat memberikan dukungan logistik dan intelijen untuk operasi "*Decisive Storm*" yang dipimpin oleh Arab Saudi tersebut (Hendra n.d., hlm.1). Gedung putih mengatakan bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan intelijen dan logistik kepada pasukan koalisi tersebut untuk mencegah pemberontak al-Houthi mengambil alih Yaman dan mempertahankan "pemerintah Yaman yang sah" (Shane 2015, hlm.1).

Adapun secara kronologis, pergerakan Arab Saudi ke Yaman sejatinya telah dimulai pada bulan November 2009, dimana sebelumnya telah terjadi pergolakan antara pemerintah Yaman melawan kelompok al-Houthi yang terus mengadakan perlawanan dan meluas hingga menyentuh wilayah perbatasan Yaman-Arab Saudi. Tindakan al-Houthi yang telah masuk ke wilayah perbatasan ini dikecam oleh pemerintah Arab Saudi. Di tambah lagi, telah terjadi perseteruan sengit di wilayah perbatasan yang menewaskan seorang tentara perbatasan Arab Saudi dan melukai 11 orang lainnya. Arab Saudi pun akhirnya melakukan intervensi militer yang dimulai dengan peluncuran pesawat Saudi F-16 dan

Tornado Jet yang mengebom wilayah pergerakan pemberontak al-Houthi di perbatasan Arab Saudi dan bagian utara Yaman, terutama wilayah Gunung Jebel al-Dukhan di perbatasan Yaman-Arab Saudi. Serangan udara juga ditargetkan ke kamp-kamp al-Houthi di Yaman (Military Operations Along Yemeni Border 2015, hlm.1). Setelah tiga bulan berkonflik, al-Houthi akhirnya setuju untuk melaksanakan gencatan senjata pada bulan Februari 2010. (Backgrounder Intervention Yemen 2015, hlm.1). Adapun pada tahun 2015, Arab Saudi kembali terlibat dalam konflik internal Yaman.

Keterlibatan Arab Saudi dan negara-negara Sunni lainnya dalam konflik internal Yaman melawan Syi'ah al-Houthi sangat mungkin akan memicu konflik sektarian di kawasan tersebut. Perang melawan al-Houthi ini cukup dapat mengalihkan fokus perang terhadap *al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP) dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang mungkin akan mencuri peluang keuntungan dari kondisi keamanan yang tidak menentu.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Pada tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi kembali melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi di Yaman melalui serangan udara yang secara langsung dimonitor oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi, Mohammad bin Salman pasca melakukan intervensi militer di Yaman sejak akhir tahun 2009. Arab Saudi bahkan menjadi pemimpin koalisi internasional dalam melakukan intervensi militer ke Yaman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Apa faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi Arab Saudi kembali melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi di Republik Yaman pada tahun 2015?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi Arab Saudi kembali melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi di Republik Yaman pada tahun 2015.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan bagi penulis, akademisi, maupun pembaca guna memahami faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi Arab Saudi kembali melakukan intervensi militer terhadap al-Houthi di Republik Yaman pada tahun 2015.

**I.4.1 Secara Akademis**, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi maupun data dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan intervensi militer Arab Saudi terhadap kelompok bersenjata al-Houthi di Republik Yaman pada tahun 2015.

**I.4.2 Secara Praktis**, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan.

## **I.5 Tinjauan Pustaka**

Konflik internal Yaman yang dilatarbelakangi oleh pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2004, dimana pada tahun 2010, pemerintah Yaman kemudian berhasil mengajak al-Houthi untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang sekaligus menandai berakhirnya konflik internal Yaman pada saat itu. Namun, ketika Revolusi Musim Semi Arab atau *Arab Spring* melanda Yaman pada tahun 2011, al-Houthi kembali melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap pemerintah Yaman, dimana al-Houthi kemudian berhasil menguasai kota-kota besar di Yaman dengan cara memanfaatkan kekacauan sosial, keamanan, politik, dan ekonomi yang ada. Adapun kekacauan situasi sosial, keamanan, politik, dan ekonomi yang terjadi telah menjadikan Yaman masuk dalam kategorisasi negara yang gagal dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah Yaman selalu mengikutsertakan pihak-pihak asing dalam menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi seperti Arab Saudi, negara-negara aliansi pan-Sunni, dan Amerika Serikat. Dalam jurnal ilmiah karya Catherine Shadnam yang berjudul "Shia-Sunni Frontline That Never Was" dijelaskan bahwa pihak-pihak asing, yaitu Arab Saudi dan Iran berupaya mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan cara memunculkan sentimen konflik sektarian guna mencapai

kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi keduanya. Menurut Catherine, penyebab konflik internal Yaman pada saat ini dapat ditinjau ulang dari sejarah pembentukan Yaman, dimana pada tahun 1990, Liga Arab berhasil menengahi dan mengakhiri perang saudara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan, dimana selanjutnya kedua negara tersebut berhasil mencapai kesepakatan mengenai pembentukan Yaman yang menyatukan Yaman Utara dan Yaman Selatan. Adapun presiden pertama Yaman berasal dari Yaman Utara, sedangkan wakil presiden Yaman berasal dari Yaman Selatan. Namun, sejak pembentukan Republik Yaman pada tahun 1990 tersebut hingga tergulingnya presiden pertama Yaman pada tahun 2012, suku minoritas Zaidi yang menganut paham Syi'ah yang berada di wilayah utara Yaman menerima tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan dari pemerintah Yaman. Adapun tindakan-tindakan diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Yaman terhadap kaum Syi'ah tersebut dipengaruhi oleh kaum Wahabbi Sunni yang berasal dari Arab Saudi yang terus berupaya mencegah masuknya pengaruh paham Syi'ah ke dalam sistem pemerintahan Yaman, dimana kemudian al-Houthi terbentuk pada tahun 1997 dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi seluruh kaum Syi'ah yang berada di wilayah utara Yaman serta merebut sistem pemerintahan Yaman.

Menurut Catherine, Arab Saudi beranggapan bahwa al-Houthi membangun aliansi dengan Iran serta memiliki tujuan untuk melemahkan Kerajaan Arab Saudi, dimana Arab Saudi juga beranggapan bahwa al-Houthi menganut paham Syi'ah sehingga seluruh kaum Syi'ah di Yaman merupakan bagian dari al-Houthi. Adapun Arab Saudi berupaya memunculkan sentimen konflik sektarian yang bertujuan untuk mereduksi hak-hak sipil seluruh kaum Syi'ah. Sementara itu, al-Houthi berhasil membangun sayap politik di bawah denominasi kelompok politik *Ansrullah* yang didominasi oleh orang-orang yang berasal dari suku minoritas Zaidi, namun al-Houthi tidak dapat mewakili seluruh anggota kelompok politik *Ansrullah* tersebut karena tidak semua anggota kelompok politik *Ansrullah* merupakan bagian dari al-Houthi. Oleh karena itu, politisi-politisi dan media-media asing perlu membedakan antara kelompok militan dan kaum minoritas Syi'ah. Selain itu, sentimen konflik sektarian juga diperbesar oleh Arab Saudi melalui pemberian label "kelompok pemberontak

bersenjata” kepada al-Houthi, dimana al-Qaeda dan *Islamic State* tidak menerima pemberian label yang sama. Adapun sentimen konflik sektarian yang muncul akan mampu menciptakan kekerasan dan pertumpahan darah, serta memberikan peluang kepada kelompok-kelompok kepentingan lainnya seperti al-Qaeda dan *Islamic State* untuk terlibat dalam konflik internal Yaman. Oleh karena itu, menurut Catherine, seluruh kaum minoritas Syi’ah tidak seharusnya menjadi target politik sesuai dengan agenda pihak-pihak asing.

Jurnal ilmiah karya Catherine Shakdam yang berjudul “Shia-Sunni Frontline That Never Was” tersebut mampu memberikan data-data mengenai sejarah pembentukan Yaman, kemunculan kelompok pemberontak bersenjata al-Houthi di Yaman, serta sentimen konflik sektarian antara mazhab Sunni yang diwakili oleh Arab Saudi dan paham Syi’ah yang diwakili oleh al-Houthi. Namun, Catherine Shakdam menggunakan pendapat pribadi dalam memberikan penjelasan mengenai pemberian label “kelompok pemberontak bersenjata” kepada al-Houthi yang dinilai oleh ia mampu meningkatkan sentimen konflik sektarian. Selain itu, Catherine Shakdam juga menggunakan pendapat pribadi dalam memberikan penjelasan mengenai kaum minoritas Syi’ah yang seharusnya tidak menjadi target politik bagi pihak-pihak asing.

Adapun persamaan substansi dari jurnal ilmiah tersebut dengan bakal skripsi yang akan diajukan oleh penulis, yaitu penulis akan membahas mengenai dinamika konflik Republik Yaman dengan al-Houthi hingga kemunculan kelompok bersenjata al-Houthi di Yaman yang kemudian memunculkan sentimen konflik sektarian di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik internal Yaman dengan fokus utama terletak pada tindakan intervensi militer yang diambil oleh Arab Saudi dalam menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi. Sedangkan, perbedaan substansi dari jurnal ilmiah tersebut dengan bakal skripsi yang akan diajukan oleh penulis, yaitu penulis tidak akan membahas mengenai al-Houthi sebagai target politik dan ekonomi dari pihak-pihak asing, melainkan penulis akan membahas terbatas mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi terkait sentimen

konflik sektarian antara Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dan Iran yang mendukung al-Houthi.

Sementara itu, dalam jurnal ilmiah karya Rannie Amiri yang berjudul “Saudi Arabia’s Military Involvement in the Yemen Conflict” dijelaskan bahwa pasukan militer Arab Saudi pernah melakukan intervensi militer ke Yaman dalam rangka menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi yang melakukan serangan darat terhadap wilayah selatan Arab Saudi dari periode tahun 2004 sampai tahun 2009 atau ketika al-Houthi melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap pemerintah Yaman untuk pertama kalinya. Pada tahun 2004, pasukan militer Arab Saudi bersama pasukan pemerintah Yaman melakukan serangan udara terhadap kelompok bersenjata al-Houthi di wilayah utara pegunungan Sa’ada, Yaman, sebagai respon terhadap aksi penembakan yang dilakukan oleh al-Houthi yang menewaskan penjaga perbatasan yang berasal dari Arab Saudi. Adapun pasukan militer Arab Saudi memperoleh dukungan alutsista dan persenjataan lainnya dari Amerika Serikat yang diantaranya meliputi helikopter Apache, F-15, jet Tornado, peralatan deteksi inframerah, drone pengamat, serta bom fosfor putih yang menargetkan posisi-posisi al-Houthi yang dimulai dari perbatasan di wilayah selatan Arab Saudi sampai ke wilayah Yaman. Adapun selama berlangsungnya intervensi militer, Yaman telah menghasilkan jumlah pengungsi sekitar 200.000 orang, dimana intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut melanggar hukum internasional. Pada bulan Februari 2010, al-Houthi mengumumkan genjatan senjata secara sepihak dan menyatakan bersedia menarik mundur pasukan militan mereka sejauh 10 km dari wilayah-wilayah Arab Saudi yang telah diduduki.

Menurut Rannie, meskipun intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut ditujukan untuk menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi, namun Kerajaan Arab Saudi mengakui bahwa intervensi militer tersebut lebih difokuskan untuk membendung pengaruh Iran di Yaman. Namun demikian, belum ada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai dukungan militer yang diberikan oleh Iran kepada al-Houthi. Adapun pemberontakan dan penyerangan yang dilakukan oleh al-Houthi terhadap

pemerintah Yaman ditujukan untuk mengakhiri marjinalisasi sosial dan ekonomi, serta diskriminasi agama terhadap suku minoritas Zaidi. Sementara itu, intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Arab Saudi, serta membantu pemerintah Ali Abdullah Saleh dalam menangani aksi pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi dan kelompok bersenjata al-Qaeda. Selain itu, intervensi militer tersebut juga ditujukan untuk mencegah efek *spill-over* dari pemberontakan kaum minoritas Syi'ah yang berada di wilayah Yaman yang dikhawatirkan akan menuju wilayah Arab Saudi. Namun demikian, intervensi militer yang dinamakan "operasi bumi hangus" tersebut terbukti tidak mampu menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi.

Jurnal ilmiah karya Rannie Amiri yang berjudul "Saudi Arabia's Military Involvement in the Yemen Conflict" tersebut mampu memberikan data-data mengenai keterlibatan Arab Saudi dalam intervensi militer di Yaman dari periode tahun 2004 sampai tahun 2009 yang dapat dijadikan sebagai tinjauan sejarah. Selain itu, Rannie Amiri juga memberikan data-data mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam memberikan dukungan militer berupa alutsista dan persenjataan lainnya kepada pasukan militer Arab Saudi. Namun demikian, Rannie Amiri tidak mampu memberikan data-data mengenai dukungan militer yang diberikan oleh Iran kepada al-Houthi secara pasti. Selain itu, Rannie Amiri juga tidak mampu memberikan data-data mengenai latar belakang yang menjadi dasar bagi al-Houthi dalam mengumumkan genjatan senjata secara sepihak dan menyatakan bersedia menarik mundur pasukan militannya dari wilayah-wilayah Arab Saudi yang telah diduduki.

Adapun persamaan substansi dari jurnal ilmiah tersebut dengan bakal skripsi yang akan diajukan oleh penulis, yaitu penulis akan membahas mengenai keikutsertaan Arab Saudi dalam melakukan intervensi militer di Yaman serta keterlibatan Amerika Serikat yang ikut membantu pasukan militer Arab Saudi, meskipun Amerika Serikat tidak secara langsung menerjunkan pasukannya. Sedangkan, perbedaan substansi dari jurnal ilmiah tersebut dengan bakal skripsi yang akan diajukan oleh penulis, yaitu penulis tidak akan membahas mengenai konflik internal Yaman dari periode tahun 2004 sampai tahun 2009, melainkan

penulis akan membahas terbatas mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam menangani pemberontakan kelompok bersenjata al-Houthi yang dimulai sejak Arab Spring pada tahun 2011 sampai tahun 2015.

Selanjutnya, dalam jurnal ilmiah karya Anna Echagüe yang berjudul “Saudi Arabia: Emboldened Yet Vulnerable” dalam buku “Geopolitics and Democracy in the Middle East” dijelaskan bahwa dinamika regional yang diwarnai oleh Revolusi Musim Semi Arab dan isu kepemilikan senjata nuklir Iran telah mengubah arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi. Anna Echagüe menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Arab Saudi identik dengan penggunaan energi sebagai upaya diplomasi pertahanan. Adapun Arab Saudi merupakan negara produsen dan eksportir minyak mentah terbesar di dunia. Meskipun Arab Saudi merupakan negara pembeli alutsista terbesar di dunia, namun Arab Saudi bersikap sangat independen dalam menjamin keamanan eksternal negaranya. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai salah satu konsumen minyak mentah terbesar di dunia berkepentingan untuk melatih dan melengkapi pasukan pertahanan Arab Saudi.

Sejak tahun 2011, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan di negara-negara Teluk telah membawa Arab Saudi keluar dari zona nyaman, dimana substansi kebijakan keamanan eksternal Arab Saudi telah berubah secara substansial menjadi lebih tegas. Arab Saudi memandang bahwa Iran berupaya untuk menancapkan hegemoni regional di kawasan Timur Tengah. Adapun secara geografis, Arab Saudi dikelilingi oleh negara-negara Teluk yang mengalami destabilitas sosial, keamanan, politik, dan ekonomi, seperti Bahrain, Yaman, Suriah, Irak, dan Lebanon. Oleh karena itu, Arab Saudi mengambil inisiatif untuk membentuk pasukan aliansi pan-Sunni bersama negara-negara Teluk untuk melawan pengaruh paham Syi'ah yang meluas, serta menggunakan pendekatan *soft power* melalui pemberian bantuan ekonomi dan pelibatan media-media massa. Namun, pelebagaan GCC yang beranggotakan Yordania, Maroko, Mesir, dan Sudan sebagai suatu aliansi pan-Sunni mengalami kegagalan dalam hal integritas politik karena terdapat

perbedaan-perbedaan dalam memahami keterkaitan antara peran Iran dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Namun demikian, pada dasarnya, arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi akan sangat ditentukan oleh peran yang dimainkan oleh putera-putera mahkota Arab Saudi yang memimpin Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Dewan Politik dan Keamanan.

Anna Echagüe juga menjelaskan bahwa dinamika regional kawasan Timur Tengah ditentukan oleh peran geopolitik Arab Saudi dan Iran dalam memenangkan persaingan ideologi masing-masing negara, dimana peran geopolitik tersebut dimainkan oleh kedua negara di negara-negara ketiga melalui bantuan militer, ekonomi, dan ideologis. Adapun kebijakan luar negeri dan regional yang dijalankan oleh Arab Saudi telah memperburuk ketegangan konflik sektarian di dalam negeri dan regional. Selain itu, Arab Saudi juga berupaya mencegah pengaruh ideologi Syi'ah Iran memasuki Irak dan Lebanon, dimana Arab Saudi memberikan bantuan militer kepada pemerintah Lebanon sebesar 3 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2013 yang dialokasikan untuk pembelian alutsista dari Perancis dan sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2014 untuk membantu pasukan pemerintah Lebanon. Adapun, Arab Saudi dan negara-negara Teluk khawatir bahwa kesepakatan nuklir yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran hanya akan memperkuat posisi Iran dalam menyebarkan pengaruh ideologi Syi'ah.

Menurut Anna Echagüe, arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi juga ikut dipengaruhi oleh ancaman revolusi terhadap *satus quo* politik Arab Saudi. Di dalam negeri, pemerintah Arab Saudi memberlakukan reformasi politik melalui *handout* ekonomi dan tindakan represif. Pemerintah Arab Saudi juga berupaya untuk mencegah mobilisasi rakyat Arab Saudi yang menuntut kebebasan berpolitik dan akuntabilitas pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, di kawasan negara-negara Teluk, pemerintah Arab Saudi juga memberikan kontribusi dalam melawan penyebaran ancaman revolusi, salah satunya, yaitu melalui pemberian bantuan ekonomi sebesar 20 miliar dollar Amerika Serikat kepada GCC guna mendukung rezim pemerintahan di Bahrain dan Oman.

Jurnal ilmiah karya Anna Echagüe yang berjudul “Saudi Arabia: Emboldened Yet Vulnerable” dalam buku “Geopolitics and Democracy in the Middle East” tersebut mampu memberikan data-data mengenai perubahan arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi sebagai respon terhadap eskalasi pemberontakan kelompok-kelompok kepentingan di negara-negara Teluk dan persaingan ideologi Syi’ah dengan Iran. Jurnal ilmiah karya Anna Echagüe tersebut juga mampu memberikan data-data mengenai implementasi perubahan arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi tersebut melalui bantuan ekonomi dan intervensi militer guna melindungi keamanan nasionalnya. Namun demikian, Anna Echagüe tidak mampu menjelaskan mengenai peran yang dimainkan oleh putera-putera mahkota Arab Saudi yang memimpin Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Dewan Politik dan Keamanan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi, serta tidak mampu memberikan data-data mengenai peran Iran dalam persaingan ideologi Syi’ah dengan Arab Saudi.

Adapun persamaan substansi dari jurnal ilmiah tersebut dengan bakal skripsi yang akan diajukan oleh penulis, yaitu penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan arah kebijakan luar negeri dan regional Arab Saudi dalam melakukan intervensi militer di Yaman. Dalam hal ini, faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh persaingan ideologi dengan Iran, peningkatan eskalasi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan di negara-negara Teluk, peran yang dimainkan oleh putera-putera mahkota Arab Saudi yang memimpin Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan serta Dewan Politik dan Keamanan, serta tuntutan-tuntutan reformasi politik di dalam negeri Arab Saudi dan kawasan negara-negara Teluk. Sedangkan, perbedaan substansi dari jurnal ilmiah tersebut dengan bakal skripsi yang akan diajukan oleh penulis, yaitu penulis tidak akan membahas mengenai pendekatan *hard power* dan *soft power* yang dilakukan oleh Arab Saudi di Bahrain, Suriah, Irak, dan Lebanon sebagai upaya pemerintah Arab Saudi dalam menjaga stabilitas keamanan eksternal negaranya secara mendalam, melainkan penulis akan lebih fokus membahas mengenai pendekatan *hard power* dalam

bentuk intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap al-Houthi di Yaman.

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis perlu mendeskripsikan jawaban dengan menggunakan teori ataupun konsep sebagai kerangka dasar berpikir. Teori dan konsep juga dapat dijadikan sebagai sarana dan juga menjadi dasar bagi prediksi, karena teori menggambarkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu saling berhubungan.

### **I.6.1 Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**

Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making Process Theory*) dari William D. Coplin. Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making Process Theory*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil dari berbagai pertimbangan rasional yang diambil oleh para pembuat keputusan di dalam suatu negara yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut William D. Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau *foreign policy* dapat dijelaskan sebagai berikut, “jika kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan tindakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Serta salah besar jika kita menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan.” Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri dalam mengambil keputusan luar negeri, diantaranya sebagai berikut.

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu sendiri yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
- b. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **I.6.2 Teori Intervensi Militer**

Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis juga menggunakan Teori Intervensi Militer. Setiap negara mempunyai metode dan strategi yang beragam dalam rangka mencapai kepentingan nasional dan menerapkan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan perspektif kaum realisme, kekuatan negara berfokus pada pengembangan militer, karena kekuatan militer merupakan jalur alternatif untuk memperluas kekuasaan. Mayoritas negara-negara besar menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya, termasuk mengambil langkah intervensi militer. Adapun intervensi menurut Bikhu Parekh, yaitu upaya mencampuri urusan negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan fisik yang diakibatkan oleh disintegrasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari suatu negara dan membantu menciptakan struktur pemerintah sipil agar terus berjalan. Oleh karena adanya alasan pencegahan dari berlangsungnya penderitaan fisik atau kemunculan korban yang meluas yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, maka bentuk intervensi yang demikian dibenarkan untuk dilakukan. Menurut Adam Roberts, suatu negara mengintervensi secara militer tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dapat bertujuan untuk mencegah penderitaan atau kematian yang meluas di antara penduduk.

Dari pengertian diatas, aksi militer yang dimaksud, yaitu intervensi humaniter dengan situasi ketika sejumlah tindakan telah diambil untuk mencegah penderitaan yang diakibatkan oleh pemerintah represif atau konflik internal yang berkembang, yang mana hak-hak politik dan sipil dari warga negara telah dilanggar. Intervensi militer didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan dengan

melintasi perbatasan negara oleh kelompok negara dan organisasi regional dengan pembenaran alasan guna memulihkan perdamaian dan keamanan sebagaimana mengakhiri penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas melalui bantuan multilateral tanpa persetujuan dari negara yang menjadi tujuan intervensi. Disini, terdapat keunggulan dalam menggunakan intervensi militer bagi suatu negara diantaranya, yaitu untuk melindungi warga yang tidak berdosa maupun membantu untuk menjatuhkan rezim. Menurut Martin Ortega, terdapat sepuluh pola intervensi militer, yaitu:

1. Pola imperialistik. Negara kuat mengintervensi secara militer negara lain untuk memperoleh keuntungan, memperdalam kepentingannya, dan meningkatkan pengaruh terhadap negara target dan dunia internasional. Pola ini juga biasa disebut dengan intervensi hegemoni, yang mana terjadi ketika negara hegemoni mengintervensi negara lain agar tidak lepas dari pengaruhnya guna menjauhkan perkembangan politik yang tidak sesuai dengan kepentingannya.
2. Pola kolonial. Kepentingan nasional dari negara kolonialis kuat dipaksakan terhadap negara lemah.
3. Perimbangan kekuatan. Selama berabad-abad ciri utama yang mengatur hubungan antar negara Eropa adalah perimbangan kekuatan antar negara berdaulat yang mengakibatkan terjadinya non-intervensi. Akan tetapi, perang dan intervensi terkadang digunakan sebagai alat untuk memperbaiki keseimbangan dan mencegah transformasi dari sistem multipolar menjadi hegemoni yang didominasi oleh satu aktor.
4. Ideologi. Negara yang mengintervensi mencoba untuk mengubah sistem politik dari negara sasaran dengan alasan ideologi.
5. Penentuan nasib sendiri. Intervensi dalam perang saudara bisa jadi mempunyai motif imperialistik atau ideologi, namun niat yang ada terkadang untuk mendukung salah satu pihak yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri. Persamaannya, intervensi asing juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang melawan pendudukan kolonial.
6. Membela diri. Angkatan bersenjata digunakan negara untuk membalas serangan dari pihak-pihak yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahnya.

Tujuan dari intervensi ini tidak untuk menggulingkan pemerintah dari negara sasaran, namun untuk mencegah serangan.

7. Pola intervensi era Perang Dingin. Antara tahun 1945 sampai tahun 1990, dua negara adidaya mengintervensi di wilayah yang dipersengketakan, baik dalam pola imperialistik atau ideologi. Pola ini meluas pada masa dekolonisasi dalam sistem lingkungan bipolar yang tidak biasa sehingga pola baru intervensi dapat ditetapkan.
8. Intervensi humaniter. Satu atau dua kelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk meredakan penderitaan manusia dalam wilayah negara lain. Terdapat dua situasi yang dibedakan, salah satunya, yaitu perlindungan warga negara di luar negeri.
9. Intervensi kolektif. Komunitas internasional secara keseluruhan memutuskan untuk mengintervensi secara militer dalam suatu negara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat dua perbedaan antara pola ini dan pola sebelumnya, yaitu pihak yang memotorisasi intervensi ini adalah Dewan Keamanan PBB yang mewakili komunitas internasional tanpa berlandaskan fakta bahwa intervensi tersebut dilakukan oleh satu atau beberapa negara atau organisasi internasional yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tipe intervensi ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat suatu negara yang telah diorganisasikan dengan wewenang umum.
10. Intervensi untuk penghukuman. Beberapa negara melakukan serangan terhadap negara lain untuk menghukum kesalahan yang dilakukan terhadap negara lain.

Intervensi militer umumnya banyak dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan besar dalam rangka memenuhi kepentingan nasional ataupun kepentingan luar negerinya.

Berdasarkan pengertian pada teori intervensi yang dikemukakan oleh Martin Ortega dalam menyikapi konflik internal yang terjadi di Yaman, terdapat sepuluh pola intervensi militer, yang mana dua diantaranya terdapat pada pola intervensi militer Arab Saudi dalam konflik internal Yaman.

Dalam pola imperialistik, negara kuat yang mengintervensi secara militer adalah Arab Saudi, dimana didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan untuk menjauhkan pemberontak bersenjata Syi'ah al-Houthi mengambilalih pusat pemerintahan Yaman karena keadaan geografis Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan jatuhnya kontrol kekuasaan Yaman ke tangan al-Houthi dapat memberikan dampak buruk bagi stabilitas Arab Saudi sendiri. Fenomena *Arab Spring* menjadi dalih keterlibatan Arab Saudi di dalam konflik internal Yaman dengan memberi dukungan kepada Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah kehilangan legitimasinya dan dianggap sebagai pemimpin diktator agar tidak turun dari jabatan kepresidenan Yaman sehingga transisi demokrasi tidak terjadi. Namun justru hegemoni terjadi ketika Arab Saudi gagal membendung para demonstran yang didukung dengan adanya pemberontakan al-Houthi. Dalih-dalih atas surat permohonan bantuan langsung dari presiden Yaman yang berikutnya, yaitu Abdu Rabbu Mansour Hadi, Arab Saudi menjadikan hal demikian sebagai sebuah tindakan yang sah dalam intervensi militer langsung Arab Saudi dalam konflik internal Yaman.

Selanjutnya, yaitu pola intervensi kolektif. Intervensi ini melibatkan komunitas internasional yang terotorisasi oleh PBB. Mobilisasi yang dilakukan oleh Arab Saudi telah melibatkan beberapa negara dan organisasi internasional seperti PBB, GCC, serta Amerika Serikat untuk bergabung melawan pemberontak al-Houthi di Yaman. Dengan hadirnya organisasi internasional yang ikut mendukung Arab Saudi, dapat dikatakan tindakan ini adalah upaya pembenaran atas keterlibatannya dalam konflik Yaman untuk mencegah tuduhan Iran yang menganggap Arab Saudi telah banyak mencampuri masalah internal Yaman.

### **I.7 Alur Pemikiran**



↓

**ARAB SAUDI MELAKUKAN INTERVENSI MILITER DALAM  
MENANGANI PEMBERONTAKAN KELOMPOK BERSENJATA SYI'AH  
AL-HOUTHY DI YAMAN**

### **I.8 Asumsi**

Arab Saudi merupakan suatu negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki bentuk sistem pemerintahan *monarkhi absolute*, dimana Arab Saudi berbatasan langsung dengan Republik Yaman yang memiliki sistem pemerintahan republik demokratis yang berada di wilayah selatan Arab Saudi. Sejak dimulainya *Arab Spring* di Republik Yaman pada tahun 2011, kelompok-kelompok kepentingan yang berada di Yaman melakukan pemberontakan di dalam negeri dan al-Houthi muncul sebagai kelompok pemberontak bersenjata yang mendominasi percaturan politik dalam negeri Yaman ketika berbagai sektor dalam negeri Yaman berada di dalam kondisi *chaos*, yang mana Yaman kemudian dikategorikan sebagai *failed state*. Oleh karena itu, Arab Saudi yang memimpin GCC memutuskan untuk melakukan intervensi militer pada tahun 2015 untuk kedua kalinya pasca melakukan intervensi militer pada tahun 2009 sampai tahun 2010 di Yaman guna menangani pemberontakan kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi berdasarkan permintaan presiden Yaman yang turut merepresentasikan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

### **I.9 Metode Penelitian**

#### **I.9.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengutip penjelasan Alan Bryman mengenai metode penelitian kualitatif, beliau menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang pada umumnya menekankan pada kata-kata kunci dan bukan pada kuantifikasi dalam kumpulan serta analisis data (Alan Bryman, 2004). Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk menjelaskan, menginterpretasikan, serta menarik hubungan antara fakta atau data dengan teori yang ada sehingga sampai pada penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tersebut, penulis berharap dapat memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan

fokus analisis penelitian, yaitu mengenai apa faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi intervensi militer yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi yang ditujukan untuk menanggapi pemberontakan kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi di Yaman pada tahun 2015.

## **I.9.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu jenis penelitian deskriptif. Penulis menggambarkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan data-data yang tersedia di lapangan, dimana permasalahan yang dimaksud, yaitu sejak *Arab Spring* melanda Yaman pada tahun 2011 hingga 2015, pemberontakan kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi yang didukung oleh Iran dan unit pasukan loyalis mantan presiden Ali Abdullah Saleh telah menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas keamanan negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Kemudian penulis menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi sebagai kekuatan besar (*great power*) di kawasan Timur Tengah dalam menangani permasalahan tersebut.

### **I.9.2.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis tidak melakukan observasi secara langsung (data primer), penulis hanya melakukan studi pustaka atau *library research*, yaitu penelitian melalui buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, media massa, skripsi-skripsi yang telah ditulis sebelumnya, internet, media elektronik, serta data-data dari sumber-sumber relevan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu mengenai perkembangan konflik internal Yaman pasca *Arab Spring* serta intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam menangani kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthi di Yaman pada tahun 2015.

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari penelitian terdahulu, baik berupa buku-buku, artikel-artikel,

jurnal-jurnal, media massa, skripsi-skripsi yang telah ditulis sebelumnya, internet, media elektronik, serta data-data dari sumber-sumber relevan lainnya.

#### **b. Teknik Mengumpulkan Data**

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, data sekunder didapatkan oleh penulis melalui studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan perpustakaan pusat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, serta mengumpulkan data-data dari sumber-sumber ilmiah lainnya.

#### **c. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis memaparkan permasalahan melalui data-data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang sebenarnya, kemudian penulis menganalisa gambaran-gambaran tersebut, menarik hubungan-hubungan dari gejala-gejala sosial yang ada, menginterpretasikan hubungan-hubungan tersebut, kemudian penulis menarik kesimpulan.

### **I.10 Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, maka penulis membagi skripsi ini menjadi 4 Bab dengan sub-bab-sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II SEJARAH PEMERINTAHAN ARAB SAUDI DAN DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI DENGAN REPUBLIK YAMAN SERTA KEMUNCULAN GERAKAN AL-HOUTHY**

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah Arab Saudi, politik luar negeri Arab Saudi, serta dinamika hubungan Arab Saudi dengan Republik Yaman sebelum kemunculan pemberontakan al-Houthy di Yaman pada periode tahun 1962-2009 dan setelah kemunculan pemberontakan al-Houthy di Yaman pada periode tahun 2009-2015.

## **BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SERTA HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH ARAB SAUDI DALAM MELAKUKAN INTERVENSI MILITER TERHADAP AL-HOUTHY DI REPUBLIK YAMAN PADA TAHUN 2015**

Bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi Arab Saudi melakukan intervensi militer terhadap al-Houthy di Republik Yaman pada tahun 2015 yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Arab Saudi dalam melakukan intervensi militer terhadap al-Houthy di Republik Yaman pada tahun 2015.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjelaskan kesimpulan penulis mengenai latar belakang intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap kelompok bersenjata Syi'ah al-Houthy di Republik Yaman pada tahun 2015 dan saran yang berupa masukan terkait permasalahan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**